



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

NOMOR : W.23-13.PR.01.03 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN.
- KESATU : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala (triwulan) dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah.
- KEDUA : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan sebagai:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;
 2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
 3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.
- KETIGA : Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.
- KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum bertanggung jawab tentang pelaporan capaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
 2. Menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi pertriwulan;
 3. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan pertriwulan pada tanggal 5 bulan berikutnya;

4. Evaluasi capaian Rencana Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan dilakukan setiap triwulan melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Perjanjian Kinerja.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Januari 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ANDI BASMAL

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TIME LINE RENAKSI		
							(TRIWULAN I / II / III / IV)		
A. BAGIAN UMUM DAN TU									
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	24,220,232,000	1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	- Melaksanakan Inventarisasi Aset di Masa Transisi	I
								- Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2027	IV
								- Menyusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN	I dan III
								- Sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM pada Saluran Media Komunikasi	I, II, III, IV
								- Melaksanakan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	I, II, III, IV
						2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	II
								- Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	II
						3	Layanan Manajemen SDM Internal	- Pemberian <i>Reward</i> Pegawai Teladan dan Penanganan Hukuman Disiplin Pegawai	I, II, III, IV
								- Melaksanakan pemutakhiran data ASN dan pengisian SKP Tahun 2025 pada menu E-Kinerja secara <i>cascading</i> pada SIMPEG HUKUM	I
						4	Layanan Manajemen Kinerja Internal	- Melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2025	I
								- Menyusun Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029	III dan IV
								- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah TA 2026	II, III, dan IV
								- Menyusun Laporan Kinerja (LKJIP) Kantor Wilayah Tahun 2024	I
								- Melaksanakan Evaluasi Mandiri AKIP oleh Tim Penilai Mandiri Kantor Wilayah	I, II, III, dan IV
								- Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Kinerja dan Anggaran (e-Monev, SMART, dan e-Performance)	I, II, III, dan IV
								- Melaksanakan Pembangunan Budaya Anti Korupsi dan Unit Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi	II
		- Menyusun Dokumen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	I						
		- Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP)	II dan IV						
		- Melaksanakan Evaluasi Mandiri terhadap Kepatuhan Pelayanan Publik	III						
		- Melaksanakan Evaluasi Standar Pelayanan	II						
		- Melaksanakan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	II						
		- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPBE	I, II, III, dan IV						

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TIME LINE RENAKSI	
							(TRIWULAN I / II / III / IV)	
						<ul style="list-style-type: none"> - Memantau Penerapan Manajemen Risiko - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan - Melaksanakan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (IKPA) - Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Data Dukung RKT RB Tahun 2025 	<p>II dan IV</p> <p>I, II, III, dan IV</p> <p>I dan III</p> <p>I, II, III, dan IV</p>	
B. DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM								
1	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	671,185,000	Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	- Pelaksanaan Persiapan Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	I
							- Melaksanakan Koordinasi dengan Unit Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota	I, II, III
							- Pelaksanaan Rapat Fasilitasi Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	I, II, III, IV
							- Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	I, II, III, IV
	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	21 Orang	60,391,000	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Daerah	- Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	I	
						- Melaksanakan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	II	
- Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	IV							
2	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	55,464,000	Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	- Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	I
							- Melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	II
			2 Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	72,793,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan	- Melaksanakan Kegiatan Focus Grup Discussion Analisis & Evaluasi Peraturan daerah	IV
							Melaksanakan Inventarisasi dan Monev Propemperda (Koordinasi dengan Instansi Terkait)	IV
3	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	82,613,000	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	- Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan JDIHN di wilayah	II
							- Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Anggota JDIH di daerah	III
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1 Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	2,520,000,000	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	Melaksanakan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum dan Monitoring Pemberi Bantuan Hukum pada Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/Putusan Pengadilan Tingkat I/Upaya Hukum Biasa	I, II, III, IV	
						2 Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	522,830,000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TIME LINE RENAKSI	
							(TRIWULAN I / II / III / IV)	
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	63,235,000	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	- Melaksanakan Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum DSH - Melaksanakan Verifikasi Kuisisioner Pengusulan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	I dan II II dan III
4	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%	391,918,000	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	- Melaksanakan Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	I, II, III
							- Melaksanakan Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM di Wilayah	I, II, III
							- Pendampingan dan Pemenuhan Data Dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	I, II, III
C. DIVISI PELAYANAN HUKUM								
1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	2,257,143,000	1 Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	- Melaksanakan Layanan Kewarganegaraan	I, II, III, IV
							- Melaksanakan Pelantikan PPNS	
							- Melaksanakan Pelantikan Notaris	
							- Melaksanakan Layanan AHU Lainnya	
							- Melaksanakan Migrasi Data Layanan AHU	
							- Melaksanakan Sosialisasi / Diseminasi / FGD / Rakor / Seminar / Webinar / Workshop / Pendalaman Materi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	
2 Pemantauan dan Evaluasi	- Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi	I, II, III, IV						
	- Melaksanakan Laporan Pemantauan dan Evaluasi							
	3 Penanganan Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		Melaksanakan Advokasi Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	I, II, III, IV				
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	1,476,414,000		Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	- Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPW	I, II, III, IV	
						- Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MPD		
				- Melaksanakan Dukungan Kesekretariatan dan Pengawasan MKNW				
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (BHP)	Terwujudnya Penyelesaian Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase Permohonan Layanan Balai Harta Peninggalan yang diselesaikan	90%	2,517,927,000	Melaksanakan Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	- Melaksanakan Layanan Balai Harta peninggalan	I, II, III, IV
							- melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pendalaman Layanan AHU	
							- Melaksanakan Publikasi dan Helpdesk	
							- Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait dan Pusat	
3	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkup BHP	1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup BHP	100%	4,551,896,000	Melaksanakan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP	- Melaksanakan Penatausahaan BMN	I, II, III, IV
			2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup BHP terhadap Layanan Kesekretariatan	3.1			- Melaksanakan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	
							- Melaksanakan Layanan Umum	
							- Melaksanakan Layanan perkantoran	
							- Melaksanakan Layanan Sarana Internal	
							- Layanan Perencanaan dan Penganggaran	
							- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
							- Melaksanakan Layanan Manajemen SDM Internal	
- Layanan Manajemen Keuangan								

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RENCANA AKSI	TIME LINE RENAksi						
							(TRIWULAN I / II / III / IV)						
						<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Survei Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan - Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Data Dukung RKT RB Tahun 2025 oleh Kantor Wilayah 							
4	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	175,930,000	Menerima Laporan Aduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Korwas PPNS Polda - Melaksanakan Kegiatan Edukasi/Pencegahan Pelanggaran HKI di Wilayah - Meneruskan Laporan Aduan Masyarakat atas Dugaan Pelanggaran HKI Kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa - Menjadi Saksi Ahli pada Persidangan Perkara Pelanggaran HKI di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 	I, II, III, IV					
							<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Promosi, Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Merek Kolektif Kekayaan Intelektual Komunal dan KI Lainnya - Melakukan Pendampingan dan Kerjasama di Bidang Kekayaan Intelektual dengan Stakeholder Terkait di Wilayah Khususnya dalam Hal Fasilitasi Permohonan Pendaftaran KI oleh Pelaku UMKM - Menerima Permohonan Pendaftaran dan Pencatatan Kekayaan Intelektual melalui Operator Kantor Wilayah Termasuk Memproses Fasilitasi Pendaftaran Merek oleh Instansi Terkait 	I, II, III, IV					
								1	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	1,371,231,000	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	I, II, III, IV
								2	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	1,132,217,000	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	I, II, III, IV